



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS

(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan atau milik Swasta.
- b. bahwa dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat oleh Perseroan (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perseroan (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
Dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara yang kantor pusatnya berkedudukan di Kota Manado.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat/daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
13. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan/atau badan hukum lain.
14. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Utara.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, adalah :

- a. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;

- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
- c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank; dan
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

TATA CARA DAN JUMLAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah dan hibah modal/saham Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. 100 (seratus) lembar saham dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Hibah/Pengalihan saham Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ; dan
 - b. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 4, Kepala Daerah memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan pengeluaran yang membebani APBD Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 28 November 2008

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA